



POLICY BRIEF'

STRATEGI OPTIMALISASI PERAN TPPS DALAM PENANGGULANGAN STUNTING

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, terdapat kebijakan di level nasional meliputi Perpres no 72 tahun 2021 lalu di tindaklanjuti dengan peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024. Di level propinsi hingga kalurahan terdapat TPPS yang merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting untuk mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian kami menyatakan bahwa meskipun TPPS telah dibentuk, namun di level pemerintahan desa hampir separo dari tim tidak mengetahui sebagai anggota, sebagian TPPS tidak mengetahui tugas dan fungsinya, serta kurangnya sosialisasi SK TPPS kepada anggota, dan koordinasi antar tim dalam TPPS masih kurang optimal. Rekomendasinya adalah penyusunan petunjuk teknis TPPS, koordinasi yang solid antar tim, baik lintas program maupun lintas sector, sinergitas antar program yang kohesif, komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendukung persepsi ibu balita dan petugas.

Sasaran Pembaca

1. BKKBN DIY
2. Bappeda DIY
3. Dinkes DIY
4. Setda DIY

Pendahuluan

Stunting adalah malnutrisi kronis yang dialami anak-anak sejak masa kehamilan ¹. Stunting menjadi prioritas masalah kesehatan nasional, dengan target capaian sebesar 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil survei SSGI tahun 2021 prevalensi stunting di DI Kabupaten Bantul sebesar 19,1%, melebihi angka prevalensi stunting di DIY yaitu 17,3% ². Menurut survei regional Dinas Kesehatan DIY, terdapat beberapa kecamatan dengan prevalensi stunting >20%, dengan prevalensi paling tinggi pada tahun 2020 adalah Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yakni sebesar 28,94% ³.

Presiden RI telah mengamanatkan percepatan penurunan stunting melalui Perpres RI no 72 tahun 2021⁴. Presiden telah memberikan kewenangan kepada BKKBN sebagai koordinator dalam kegiatan ini. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Disetiap level pemeritahan dari propinsi hingga tingkat desa/kalurahan dibentuk TPPS dengan pmpinan daerah sebagai ketua. TPPS ini merupakan organisasi untuk percepatan penurunan stunting, tugasnya adalah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Policy Brief ini disusun berdasarkan temuan di lapangan dengan metode kualitatif melalui diskusi kelompok terarah dengan seluruh TPPS baik di level propinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan. Pengambilan data secara Rapid Assesment Prosedur oleh tim peneliti pada bulan Mei hingga September 2022.

Permasalahan

- Meskipun TPPS telah dibentuk, namun hampir setengah tim di level pemerintahan desa tidak mengetahui sebagai anggota.
- Sebagian TPPS tidak mengetahui tugas dan fungsinya.
- Sosialisasi TPPS tentang SK TPPS kepada anggotanya belum optimal
- Koordinasi antar tim dalam TPPS masih kurang optimal, utamanya pada sektor non kesehatan, Permasalahan ini seperti pada tahun sebelumnya⁵.

- Penolakan ibu balita dan keluarga yang mempunyai balita stunting, yang dapat berdampak pada keberhasilan program.

Rekomendasi Kebijakan

- Penyusunan petunjuk teknis sebagai pedoman TPPS
- Koordinasi yang solid antar tim, baik lintas program maupun lintas sector
- Sinergitas antar program yang kohesif
- Komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendukung persepsi ibu balita dan petugas

Daftar Pustaka

1. Save the Children. Global Stunting Reduction Target: Focus on the Poorest or Leave Millions Behind. Published online 2012:1-10.
2. Kementerian Kesehatan RI. *Buku Saku Hasil Studi SSGI Tingkat Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. Kementerian Kesehatan RI; 2021.
3. Dinkes DIY. *Profil Kesehatan D.I Yogyakarta Tahun 2021.*; 2020.
4. Presiden RI. Peraturan Presiden RI No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Published 2021. Accessed February 20, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>
5. Tri Siswati AM. Policy Analysis Reducing Under Five Stunting Children in Special Region Yogyakarta, Indonesia. *JKKI*. 2022;2(11). doi:<https://doi.org/10.22146/jkki.71795>

Penyusun:

Tri Siswati^{1,2*}, Heru Subaris Kasjono^{1,2}, Slamet Iskandar^{1,2}

1 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Tata Bumi No 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293, Indonesia.

2 Pusat Unggulan Iptek Inovasi Teknologi Terapan Kesehatan Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Tata Bumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293, Indonesia

3 Puskesmas Dlingo II, Dlingo, Bantul, DIY

*Correspondence: tri.siswati@poltekkesjogja.ac.id